

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menyatakan, kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap tercapai atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tertuang dalam peran sebagai saksi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah juga akan menuntut agar penjelasan yang tepat atas kinerja yang gagal diberikan sehingga para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahaminya (Utami, 2020). Agar terlaksananya dokumentasi dan perencanaan kegiatan ketatanegaraan serta terjaminnya integritas keuangan kegiatan tersebut, maka perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan APBD agar seluruh perkiraan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat.

Landasan pelaporan untuk pelaporan kinerja lembaga penyelenggara negara. Laporan tentang pelaksanaan program pemantauan kinerja lembaga penyelenggara negara (LAKIP) harus dibuat sesuai dengan pedoman pelaporan umum, yaitu harus jujur, objektif, tepat, dan transparan. Selanjutnya, Lembaga Manajemen Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman penyusunan LAKIP yang di dalamnya terdapat beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban

- b. Prinsip Prioritas
- c. Prinsip Manfaat
- d. Evaluasi Kinerja.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Locke dan Latham memperkenalkan teori penetapan tujuan. Teori ini menjelaskan hubungan antara produktivitas dan pencapaian tujuan. Menurut teori penetapan tujuan, penetapan tujuan yang menantang dan terukur dapat meningkatkan hasil kerja, yang kemudian dapat dihubungkan dengan bakat dan kompetensi kerja. Instansi publik harus mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara terbuka untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas yang diberikan kepadanya. Pemerintah daerah juga harus mengkomunikasikan akuntabilitas atas pencapaian dan kegagalan organisasi. Laporan tentang manajemen kinerja mengasumsikan bahwa hal tersebut merupakan tujuan pemerintah daerah, berdasarkan adaptasi teori penetapan tujuan. Variabelnya adalah sistem pengendalian internal organisasi, pengendalian atas pelaporan akuntansi, dan kejelasan tujuan anggaran.

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah daftar tugas yang diprioritaskan yang harus diselesaikan dalam hari kerja tertentu. Tahap selanjutnya dari pembuatan anggaran adalah penganggaran (Mardiasmo, 2005:61 dalam Aglisnema, 2019). Anggaran merupakan hasil dari perencanaan strategis dan perumusan strategi. Karena penganggaran perlu dilakukan sejalan dan berfokus pada

kinerja yang akan dilakukan, maka penganggaran dapat dilihat sebagai langkah krusial dalam proses tersebut. Menurut Mardiasmo (2005:61), Unsur-unsur berikut termasuk dalam anggaran publik :

- a. Aspek perencanaan,
- b. Aspek pengendalian,
- c. Aspek akuntabilitas publik

Kejelasan tujuan anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan tersebut ditetapkan dengan jelas, terutama berkenaan dengan pernyataan bahwa anggaran memperhitungkan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan cara ini, tujuan anggaran daerah yang spesifik ditetapkan dan dibuat terukur bagi mereka yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaannya (Kenis 1979 dalam Precelina dan Wuryani, 2019). Untuk menetapkan sasaran kinerja yang jelas dalam perencanaan anggaran daerah dan memberi inspirasi kepada pegawai agar bekerja sekeras-kerasnya guna mencapai sasaran tersebut, maka anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah hendaknya dijadikan sebagai tolok ukur pemenuhan kinerja yang diharapkan.

2.1.4 Pengendalian Akuntansi

Proses pengendalian Akuntansi merupakan alat untuk membangun tingkat kepercayaan yang wajar terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini mencerminkan hukum dan peraturan melalui keakuratan dan keandalan laporan keuangan, kelayakan dan keandalan pelaksanaan program dan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku. Prosedur ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai acuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan menggunakan pengendalian akuntansi, kejadian-kejadian di masa mendatang dapat diandalkan. Sistem akuntansi yang baik dapat mengumpulkan data untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Sesuai dengan temuan Widaryanti dan Pancawardani (2020), organisasi pemerintah yang mampu menempatkan diri dalam posisi untuk mengatur dan menilai semua kegiatan pemerintah dan persyaratan pelaporan. Tujuan dari pengendalian akuntansi adalah untuk menilai seberapa cermat, efisien, dan efektif kegiatan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan daerah, karena hal ini berfungsi sebagai barometer keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.

Manfaat pengendalian akuntansi terletak pada pengendalian biaya, atau akuntabilitas atas pengendalian biaya. Pihak-pihak yang paling berkepentingan yang bertanggung jawab atas penganggaran biaya yang mereka kendalikan harus diserahkan untuk bertanggung jawab atas pengendalian biaya. (Precelina dan Wuryani, 2019).

2.1.5 Komitmen Organisasi

Keterlibatan organisasi mengacu pada tingkat kesediaan seorang individu untuk mendukung suatu organisasi dan tujuannya serta tetap menjadi anggota (Lubis 2017:83 dalam Aglisnema, 2019). Namun menurut Anwar (2018) menjelaskan Komitmen organisasi menggambarkan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu demi memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi dan mendahulukan kepentingan organisasi di atas

kepentingannya sendiri. Ini dapat terjadi karena seseorang memiliki ikatan emosional dengan organisasi tempat mereka bekerja. Ada beberapa sumber dorongan dan keyakinan, seperti dukungan moral, kemampuan untuk menerima lingkup organisasi, dan keinginan kuat untuk mengabdikan kepada organisasi. Keyakinan dan kepatuhan yang lebih kuat terhadap prinsip dan tujuan organisasi, kemampuan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk kesejahteraan organisasi, dan keinginan yang lebih kuat untuk mempertahankan anggota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan memperkuat hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan terkait erat dengannya. Peneliti mengambil objek pada Bakeuda Kota Tegal.

Berikut hasil penelitian yang relevan, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
Silta Aglismena (2019)	Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Partisipasi Penyusunan Anggaran	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran Y : Akuntabilitas Kinerja	Temuan studi menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional agen dipengaruhi secara positif oleh kemampuan mereka untuk

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
		Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Z : Komitmen Organisasi	Instansi Pemerintah Z : Komitmen Organisasi	menetapkan tujuan yang jelas untuk anggaran mereka, keterlibatan mereka dalam proses persiapan anggaran, yang dipengaruhi secara positif oleh tujuan itu sendiri, dan keterlibatan mereka dengan organisasi, yang tidak meningkatkan hubungan antara tujuan anggaran dan persiapan anggaran.
Atikah Hasanah (2021)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,	Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan instansi pemerintah akan transparansi dalam tujuan

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
	Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)	<p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</p>	<p>X₂: Pengendalian Akuntansi</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</p>	<p>anggaran akan memengaruhi kebutuhan mereka akan transparansi, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan instansi negara terhadap persyaratan akuntansi tidak bergantung pada pengendalian atas pelaksanaannya. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa transparansi tujuan anggaran dan pengendalian pembukuan memiliki pengaruh positif</p>

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
				dan signifikan terhadap persyaratan pelaporan pejabat di Kantor Wilayah VI Medan.
Muhammad Hafzhan (2021)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)	<p>X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>X₃ : Sistem Pelaporan</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Temuan penelitian ini mendukung hipotesis parttest dengan menunjukkan bahwa variabel "Klarheit der Haushaltsziele" tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban badan negara untuk melaporkan informasi. Lebih tepatnya, untuk variabel X1 (-1.110), $t_{hitung} < t_{tabel}$. Lebih jauh, hal ini

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
				<p>menunjukkan bahwa variabel pengendalian pembukuan ($t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan t_{hitung} untuk Variabel Hasil penelitian, yang mendukung hipotesis pada tingkat signifikansi 5%, F_{hitung} 3.322 dan F_{tabel} 2.87, menggambarkan bagaimana sistem pelaporan, pengendalian pembukuan, dan kejelasan tujuan anggaran berfungsi ketika $F_{hitung} > F_{tabel}$.</p>
Nur Heni Safitri (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,	X_1 : Kejelasan	X_1 : Kejelasan	Berdasarkan hasil penelitian,

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
	Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen)	<p>Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Sistem Pelaporan</p> <p>X₃ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>X₄ : Kompetensi Aparatur Pemerintah</p> <p>X₅ : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)</p>	<p>Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>faktor-faktor berikut tidak mempengaruhi perlunya responsivitas lembaga pemerintah: Kewajiban pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan tekun dipengaruhi oleh tingkat kompetensinya; penegakan hukum dan peraturan berdampak pada kewajiban tersebut. dan Transparansi dalam metode pelaporan, pembukuan, sistem pelaporan, dan tujuan anggaran.</p>

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
(Mulya & Fauzihardani, 2022)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi	<p>X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>X₃ : Sistem Pelaporan</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Z : Kepatuhan Terhadap Regulasi</p>	<p>X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran,</p> <p>X₂ : Pengendalian Akuntansi</p> <p>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Hasil uji statistik menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntansi, pelaporan, dan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pelaporan kinerja instansi pemerintah, variabilitas sasaran anggaran berdampak positif dan signifikan terhadap tanggung jawab tersebut.</p> <p>Hubungan antara variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem</p>

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Hasil
				<p>pengendalian pembukuan dan pelaporan, serta pemantauan kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Banyak dapat dimoderasi dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Perluasan ukuran tusuk probe dan penambahan variabel yang dapat memberikan dampak merupakan saran untuk penelitian lebih lanjut.</p>

2.3 Logika dan Penurunan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Isnanto (2019), Tujuan anggaran harus didefinisikan dengan jelas terkait sarannya sehingga karyawan yang bertanggung jawab dapat memahaminya. Hal ini dikenal sebagai kejelasan tujuan anggaran. Masalah muncul ketika keputusan mengenai anggaran dibuat dengan cara yang tidak mencerminkan visi yang jelas. Oleh karena itu, anggaran perlu benar-benar ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan rumah tangga dan membawa perubahan umum. Tujuan otoritas anggaran regional harus dinyatakan secara tepat dan mudah dipahami oleh mereka yang bertugas membuat dan melaksanakan kegiatan anggaran. Sasaran anggaran yang ditetapkan dengan baik berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat kekompakan tata kelola daerah. Penetapan sasaran keuangan yang spesifik dapat membantu meningkatkan manajemen kinerja lembaga negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Aglisnema (2019), Hasanah (2021) dan Mulya *et al.*, (2022) dalam penelitian ini mendukung kejelasan sasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Bagi pemerintah kota, pengendalian akuntansi merupakan suatu keharusan. Melalui pengembangan dan penyempurnaan standar akuntansi pemerintahan, manfaat dari pengawasan pelaporan akuntansi berbasis standar ini akan memperkuat akuntabilitas dan ketergantungan administrasi keuangan negara. Pelaksanaan kinerja keuangan yang efektif, murah, dan efisien merupakan hasil dari pengendalian akuntansi yang baik. Di sisi lain, kemampuan suatu badan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif dapat terancam jika kontrol akuntansi pemerintah terganggu dan laporan keuangan yang direncanakan tidak mematuhi persyaratan yang diamanatkan hukum untuk pengungkapan akuntansi pemerintah. (Juliastuti *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Mikoshi (2020) dan Susanti *et al.*, (2023) dalam penelitiannya mendukung pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₂ : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi.

Ketika seseorang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya untuk memenuhi visi dan misi organisasi, maka ia dapat menunjukkan komitmen organisasinya. Sementara itu, ada alasan mengapa target anggaran bersifat eksplisit, yaitu karena anggaran dibuat dan diputuskan dengan cara

yang jelas dan tepat, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya dapat menindaklanjutinya.

Komitmen organisasi yang kuat dari pegawai atau pejabat pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang akurat dalam rangka memenuhi visi dan tujuan organisasi dapat meningkatkan kejelasan tujuan anggaran dan mengarah pada akuntabilitas kinerja lebih baik. Selain itu, hal ini memungkinkan komitmen organisasi untuk meningkatkan hubungan antara tanggung jawab kinerja dan target anggaran yang jelas. (Aglisnema, 2019).

Tujuan pembuatan anggaran dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintah adalah untuk membuatnya jelas dan tepat bagi para penggunanya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap karyawan dan pejabat pemerintah berkomitmen pada organisasi, yang akan mempermudah pembuatan anggaran yang selaras visi dan misi organisasi dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.4 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi.

Depari (2021) menyatakan pengendalian merupakan suatu proses penetapan tolok ukur dengan mengumpulkan umpan balik atau kinerja aktual serta memutuskan tindakan apa yang harus diambil apabila kinerja aktual menyimpang secara signifikan dari kinerja yang direncanakan sebelumnya. Salah satu ukuran kinerja pemerintahan daerah adalah keekonomisan,

efektivitas, dan efisiensi pelayanan yang diberikan organisasi atau lembaga tersebut kepada masyarakat.

Ketika seseorang memiliki kepercayaan, rasa memiliki, dan rasa memiliki terhadap seluruh organisasi, mereka dikatakan terlibat secara organisasi ketika kepentingan mereka sendiri dikesampingkan demi kepentingan organisasi. (Purnamasari, 2017). Hal tersebut dapat mendukung adanya pengendalian akuntansi yang ekonomis, efisien, dan efektifitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena alasan inilah seseorang mencoba mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja kerja, atau kinerja, dijelaskan menggunakan teori penetapan tujuan yang diusulkan Locke dan Latham (Prezelina, 2019). Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa proses penetapan tujuan yang menantang dan pengukuran hasil dapat menghasilkan peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan kapasitas atau kompetensi kerja. Proses ini dapat memperkuat keterlibatan karyawan dengan kontrol pembukuan organisasi.

H₄ : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Loyalitas karyawan terhadap organisasi ditunjukkan oleh perhatian berkelanjutan anggota agen terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi serta sikap mereka terhadapnya. Proses ini dikenal sebagai keterlibatan organisasi. Sejauh mana karyawan terlibat dengan perusahaan tempat mereka

bekerja memiliki dampak signifikan terhadap apa yang dihasilkan perusahaan (Depari, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Depari (2021) yang menjelaskan keterlibatan hanya dapat dihasilkan oleh kredibilitas yang tinggi, dan hanya dengan demikian suatu lembaga pemerintah dapat berkinerja baik. Selain itu, terdapat korelasi yang baik antara keterlibatan organisasi dan kinerja, dengan keterlibatan yang kuat tidak diragukan lagi berperan sebagai motivator untuk kinerja yang tinggi. Komitmen organisasi yang rendah tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Demikian pula, semakin tinggi tingkat keterlibatan organisasi, semakin tinggi pula kinerja yang dicapai.

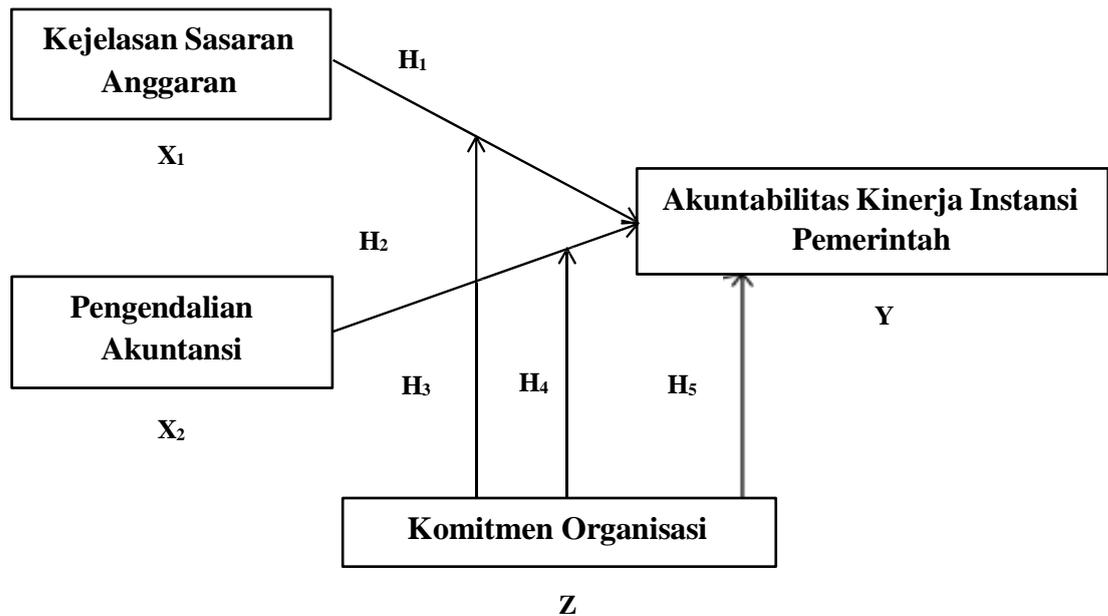
H₅ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.4 Model Penelitian

Untuk memudahkan orang dalam menetapkan tujuan anggaran, penting untuk memahami kejelasan tujuan dalam anggaran. Penerapan sistem pengendalian akuntansi yang efisien juga diperlukan untuk mencapai kinerja manajemen yang baik. Komitmen organisasi yang kuat diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian kinerja manajemen selama pelaksanaan pengeluaran yang dianggarkan. Kontrol akuntansi yang kuat, tujuan anggaran yang ditetapkan, dan keterlibatan organisasi yang kuat kemungkinan besar menjadi sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintah—terutama dalam bidang manajemen keuangan—dalam rangka mendukung penetapan kewajiban penarikan kembali kinerja instansi pemerintah daerah. Anggaran merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana urusan pemerintah dilaksanakan, dan

pencapaian anggaran identik dengan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran harus realistis, bermutu tinggi, dan dikelola dengan ketat untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian